

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kualitas merupakan penilaian terhadap suatu output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang ataupun dari segi yang tidak berwujud seperti kegiatan (Setyowati *et al.*, 2016). Dalam kaitannya dengan laporan keuangan, pemerintah harus mampu untuk menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas (Barus *et al.*, 2021). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 suatu laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi empat karakteristik, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami. Untuk menerbitkan laporan keuangan yang berkualitas, maka dibutuhkan adanya pengawasan juga pengelolaan keuangan yang baik (Gustina, 2021). Pengelolaan keuangan dalam suatu laporan yang disusun mestilah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (bpk.go.id, 2020). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun pada akhir periode ialah salah satu bentuk media pemerintah daerah guna mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik (Vidyasari, 2021).

Laporan keuangan pemerintah yang disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah digunakan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah (Gustina, 2021). Secara umum, tujuan dan fungsi dari laporan keuangan sektor publik yaitu kepatuhan dan pengelolaan, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif, perencanaan dan informasi otorisasi, kelangsungan organisasi, hubungan masyarakat, serta sumber fakta juga gambaran (Mardiasmo, 2018).

Pada setiap tahun, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan dilakukan pemeriksaan serta diberikan penilaian berupa opini dari pihak Badan Pengawas Keuangan (BPK) (Jauhari *et al.*, 2021). Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara bahwasannya ada empat jenis opini yang diberikan BPK RI terhadap

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar, serta Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Dari keempat jenis opini yang diberikan oleh BPK, dasar utamanya ialah terkait dengan kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (bpk.go.id, 2020).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari web.lampungengahkab.go.id, pada tahun anggaran 2012 hingga 2017 Kabupaten Lampung Tengah sempat memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di tahun 2013, 2014, 2015 dan 2017 yang berarti adanya penurunan akuntabilitas juga transparansi penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Kemudian pada tahun 2018 hingga 2020 Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Lampung. Walaupun demikian, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan jaminan laporan keuangan yang disajikan pemerintah terbebas dari penyimpangan (teraslampung.com). Kepala Perwakilan BPK-RI Lampung Andri Yogama mengatakan bahwa masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan serta diharapkan bisa diperbaiki. Salah satunya ada masalah dalam hal penerbitan aset dan terdapat pengadministrasian pada aset yang tidak akurat. Selain itu juga, ada masalah temuan pengembalian kelebihan pembayaran pengerjaan proyek fisik di Dinas Bina Marga Lampung Tengah serta BPK juga berharap Kabupaten Lampung Tengah bisa mencapai persentase penilaian sebesar 85%, karena saat ini Kabupaten Lampung Tengah baru mencapai 79% persentase penilaian (web.lampungengahkab.go.id). Berdasarkan hal tersebut, fenomena pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah begitu layak untuk dikaji lebih lanjut.

Salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah adalah sistem pengendalian intern pemerintah (Darmawan & Darwanis, 2018). Pengendalian intern digunakan untuk menemukan atau menganalisis permasalahan-permasalahan yang sudah ada ataupun permasalahan yang

kemungkinan akan timbul dalam proses mencapai tujuan, hingga tujuan yang hendak dicapai tersebut bisa diketahui dengan jelas (Gustina, 2021). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ialah proses yang integral terhadap tindakan serta kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh karyawan ialah guna memberikan keyakinan memadai terhadap tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun menurut Mahaputra (2014) dalam Darmawan & Darwanis (2018) penerapan Sistem Pengendalian Intern mampu untuk meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi, mencegah adanya inkonsistensi, dan juga mempermudah proses audit laporan keuangan, semakin baik Sistem Pengendalian Intern maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula. Di dalam hasil penelitian dari Darmawan (2018), Rohmah *et al.*, (2020) serta Indrayani & Widiastuti (2020) menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Perkembangan sektor publik saat ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat dan daerah (jurnal.id). Hal ini dikarenakan tuntutan masyarakat yang makin meningkat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Lestari & Dewi, 2020). Oleh karena hal itu, maka pemerintah dituntut agar mampu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Menurut Mardiasmo (2018) akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) guna memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Laporan keuangan pemerintah memiliki manfaat yaitu salah satunya sebagai media akuntabilitas publik (djp.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id). Sebagai media akuntabilitas publik, laporan keuangan pemerintah memiliki kewajiban guna memberikan informasi

sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk mengetahui, hak diberikan informasi, serta hak untuk didengarkan aspirasinya (djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ialah pertanggungjawaban terkait integritas keuangan, pengungkapan, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Riyanti, 2017). Salah satu upaya khusus guna melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan ialah melalui penyampaian laporan keuangan yang disusun tepat waktu serta sesuai prinsip SAP (Vidyasari, 2021). Pada penelitian yang dilakukan oleh Vidyasari (2021) menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Selain Sistem Pengendalian Intern yang baik dan adanya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah haruslah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dimana di SAP ini memuat prinsip-prinsip yang mesti diterapkan guna memperoleh hasil laporan keuangan yang berkualitas (Gustina, 2021). Jadi, dapat dikatakan bahwasannya Standar Akuntansi Pemerintah ialah persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Gumelar, 2017). Menurut Latifah dan Sabeni (2007) dalam Defitri (2018), sistem akuntansi keuangan daerah berguna memenuhi tuntutan masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Dengan diterapkannya Standar tersebut pada saat penyusunan laporan keuangan, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik juga berkualitas (Defitri, 2018). Pada penelitian yang dilakukan oleh Jauhari *et al.*, (2021), Vidyasari (2021) dan Gustina (2021) menunjukkan hasil bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Gustina (2021) yang melakukan studi pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun

perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penulis menambahkan variabel independen yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan objek penelitiannya pada OPD Kabupaten Lampung Tengah. Tambahan variabel ini didasarkan pada penelitian Vidyasari (2021) yang meneliti terkait pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dimana di penelitian tersebut, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Pada OPD Kabupaten Lampung Tengah)”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Adanya ruang lingkup penelitian dilakukan agar penelitian dan pembahasan menjadi lebih terarah, sehingga hasilnya tidak bias dan sesuai dengan harapan peneliti. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah menguji secara empiris pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada OPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang muncul pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada OPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah?

2. Apakah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada OPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah?
3. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada OPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Membuktikan secara empiris pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada OPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Membuktikan secara empiris pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada OPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
3. Membuktikan secara empiris pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada OPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan serta bukti empiris mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah pada OPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis/bagi pemerintah

Sebagai sumbangan pemikiran agar dapat digunakan atau diambil manfaatnya dan dijadikan bahan untuk pertimbangan dalam mengambil kebijakan terkait kualitas laporan keuangan pemerintah.

3. Bagi Peneliti

Sebagai bahan pertimbangan antara teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan dan pengembangan akuntansi keperilakuan dan akuntansi sektor publik.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penyajian dan pembahasan dari hasil penelitian akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan peneliti, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan bangunan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, teknik analisis data, metode analisis data, dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang analisis menyeluruh atas penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Hasil-hasil statistik diinterpretasikan dan dikaji secara lebih mendalam oleh peneliti hingga tercapai hasil analisis dari penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini memaparkan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**